



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG**

JALAN GUBERNUR HAJI ASNAWI MANGKU ALAM
KEL. KEBUN BUNGA, KEC. SUKARAMI, PALEMBANG KODE POS 30152
TELEPON (0711) 5278090
LAMAM www.kkp.go.id SUREL karantinaperikananpalembang08@gmail.com

Yth. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP
Di Jakarta

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.96/SKIPM.PLG/TU.210/II/2025**

No	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Terlampir kami kirimkan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
Nama Jabatan

Palembang, 18 Januari 2025

Pengirim

Kepala Stasiun Stasiun KIPM Palembang,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap

Diterima tanggal,

2025

No. HP.....



Yogyakarta Fibrianto



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Stasiun KIPM Palembang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Kami berharap kritik dan saran membangun untuk meningkatkan peran dan mutu Kinerja Stasiun KIPM Palembang.

Palembang, 17 Januari 2025



Yoyok Fibrianto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Palembang menjalankan mandat untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Palembang berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengendalian dan pengawasan mutu yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP Tahun 2024 adalah "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif". Keberhasilan program tersebut didukung melalui pencapaian kinerja pada Stasiun KIPM Palembang yang terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Kegiatan (Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan, Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang) dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 114,83 % (Istimewa), dengan rincian dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dengan hasil sebanyak 14 Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan (>100%) dan sebanyak 1 Indikator Kinerja tercapai sesuai dengan target (100%) Pada Tahun 2024.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dengan hasil yang sangat baik yaitu mencapai Rp.5.604.371.042 atau 95,19 %

dari alokasi anggaran Rp 5.887.307.000. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja: 114,83 %).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Agenda Stasiun KIPM Palembang	3
E. Sumber Daya	4
F. Dasar Pelaporan Kinerja.....	5
G. Tujuan Pengukuran Kinerja	6
H. Ruang Lingkup.....	6
I. Waktu Pengukuran Kinerja	6
J. Metodologi Pengukuran Kinerja	6
K. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2020 – 2024.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	10
C. Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024	10
D. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Palembang	18
B. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang	18
C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	49
D. Realisasi Rencana Aksi	50
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53

B. Rencana Perbaikan 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024.....	4
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 (Awal)	11
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 (Revisi)	13
Tabel 4.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024	15
Tabel 5.	Penilaian Capaian Kinerja	18
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	19
Tabel 7.	Realisasi IK 1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	23
Tabel 8.	Realisasi IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	26
Tabel 9.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.....	27
Tabel 10.	Realisasi IK 3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.....	27
Tabel 11.	Realisasi IK 4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang...	28
Tabel 12.	Realisasi IK 5 Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	30
Tabel 13.	Realisasi IK 6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT	

	Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	31
Tabel 14.	Realisasi IK 7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	34
Tabel 15.	Realisasi IK 8 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	36
Tabel 16.	Realisasi IK 9 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	37
Tabel 17.	Realisasi IK 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	38
Tabel 18.	Realisasi IK 11 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	44
Tabel 19.	Realisasi IK 12 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%).....	45
Tabel 20.	Realisasi IK 13 Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	47
Tabel 21.	Realisasi IK 14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%).....	48
Tabel 22.	Realisasi IK 15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	49
Tabel 23.	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024.....	49
Tabel 24.	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja SKIPM Palembang Tahun 2024	50
Tabel 25.	Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2024.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2024	5
Gambar 2.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang 2024.....	19
Gambar 3	Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan umum pengawasan nasional Tahun 2020-2024 tercantum pada beberapa misi Presiden RI Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi Presiden RI Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Adapun beberapa misi Presiden RI dalam substansi kebijakan umum pengawasan nasional yaitu termaktub pada misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dan misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”. Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

KKP sebagai organisasi yang membantu Presiden RI pada bidang kelautan dan perikanan, menetapkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2020-2024 sebagai visi dan misi KKP Tahun 2020-2024. Implementasi atas visi dan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat dan memberi manfaat serta menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

BPPMHKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, BPPMHKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu secara profesional dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BPPMHKP, Stasiun KIPM Palembang selaku salah satu unit pelaksana kinerja BPPMHKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik melalui mekanisme pelaporan kinerja untuk memastikan perkembangan capaian kinerja sesuai dengan

harapan selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palembang yang bertujuan untuk memberikan informasi atas berbagai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas/fungsi selama satu tahun. Pelaporan kinerja dilakukan dengan evaluasi secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

B. DASAR HUKUM

Stasiun KIPM Palembang melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka organisasi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM

Palembang memiliki tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta penyusunan laporan hasil terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan administrasi lingkup BPPMHKP.

Stasiun KIPM Palembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. AGENDA SKIPM PALEMBANG

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional, sehingga dijadikan salah satu agenda pembangunan nasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi komposisi Sumberdaya Manusia Stasiun KIPM Palembang Terdiri dari 33 orang pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang
Tahun 2024**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala	1
2.	Kepala Urusan Umum	1
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	3
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	6
5.	Pengelola Keuangan	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
8.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pelaksana	2
9.	Analisis Barang Milik Negara	1
10.	Analisis Keuangan	1
11.	Analisis SDM Aparatur	1
12.	Bendahara Pengeluaran	1
13.	Pengadministrasian Persuratan	1
14.	Pengadministrasi Umum	1
15.	Pengadministrasi Perkantoran	1
16.	PPNPN	6
17.	Outsourcing	4
Jumlah		33

Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024



2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.887.307.000.

F. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Palembang.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2024.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2024
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2025

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan :

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Stasiun KIPM Palembang berdasarkan Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Stasiun KIPM Palembang, Sumber Daya, Dasar Pelaporan Kinerja, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024, Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Stasiun KIPM Palembang, Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang, Analisis Pengelolaan Sumber Daya

Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang mencakup kesimpulan dan rencana perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN BPPMHKP TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024 dan turunannya pada BPPMHKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan BPPMHKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPPMHKP mempunyai visi :

“Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan, gotong royong”

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil BPPMHKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi BPPMHKP

Misi KKP dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPMHKP, yaitu:

- **Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.**
- **Meningkatkan penerapan praktik yang baik disetiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.**
- **Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.**
- **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen BPPMHKP dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan BPPMKP KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPMHKP. Adapun tujuan strategis BPPMHKP adalah:

Mengendalikan dan Mengawasi Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran Pengendalian Mutu Perikanan. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

4. Sasaran Strategis

Sebagai unit pengendalian dan pengawasan mutu, BPPMHKP mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP.
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Sedangkan Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 adalah:

1. Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
2. Tatakelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPPMHKP.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2024, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.386.307.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.495.307.000,-
2. Pengendalian Mutu alokasi anggaran sebesar Rp 271.500.000,-
3. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan alokasi anggaran sebesar Rp 619.500.000,-

C. PENETAPAN KINERJA SKIPM PALEMBANG TAHUN 2024

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja BPPMHKP, Stasiun KIPM Palembang selaku unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan pada unit produksi dan penanganan atau pengolahan mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 (Awal)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
1	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	5
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	2
		3	Sertifikat Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Produk)	4
		4	Upi yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
2	Terselenggaranya pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT SKIPM Palembang (Nilai)	84
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT SKIPM Palembang (Lokasi)	2
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks)	84
		8	Nilai Mandiri SAKIP lingkup UPT	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Stasiun KIPM Palembang	
		9 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	100
		10 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BPPMHKP Lingkup SKIPM Palembang	75
		11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Palembang (Nilai)	93,75
		12 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT SKIPM Palembang SKIPM Palembang (Nilai)	82
		13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	80
		14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup UPT SKIPM Palembang (%)	80

Dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2024 telah dilakukan revisi atas dokumen Perjanjian Kinerja lingkup BPPMHKP pada Target Indikator Kinerja. dan perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 (Revisi) yang disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 (Revisi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	86

	8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
	9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82
	10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71
	11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	93,76
	12.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
	13.	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80
	14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80
	15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80

D. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Stasiun KIPM Palembang menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi

informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan Stasiun KIPM Palembang dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100

SK. 2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3,36	3,73
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	86	89,49
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	75,65
		9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82	82,80
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71	85
		11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	93,76	94,05
			Penyelesaian temuan BPK		

		12	lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100
		13.	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	100
		14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	91,98
		15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	97,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Stasiun KIPM Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Penilaian Capaian Kinerja

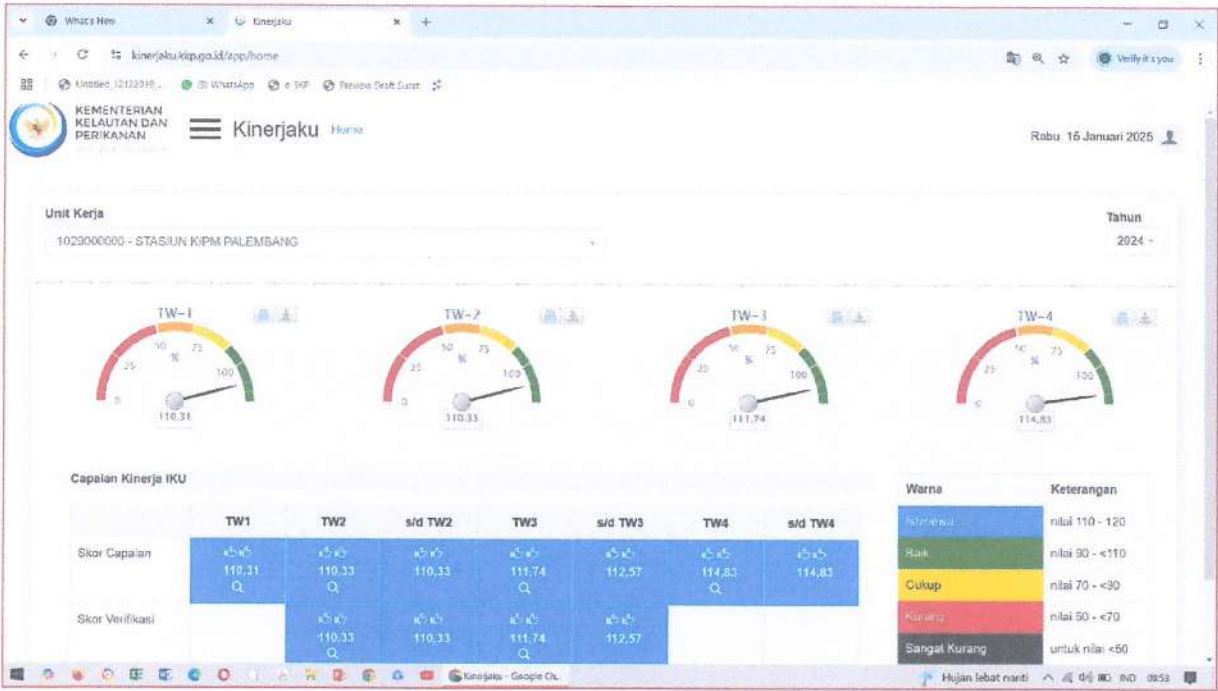
No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

B. CAPAIAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang dilaksanakan dari bulan Januari - Desember 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 (Revisi) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan

kinerja (kinerjaku), Capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang disampaikan sebagaimana pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM PALEMBANG Tahun 2024

Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dengan capaian **114,83 % (kategori Istimewa)**. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang hanya **106,10 % (kategori Baik)**. Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Triwulan IV Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	70	100	142,85

	Perikanan		lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)			
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		3.	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100	101,01
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
SK.3	Terselenggara nya Tata Kelola Pemerintahan	6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM	3,36	3,73	111,01

yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang		Palembang (Indeks)			
	7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	86	89,49	104,05
	8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	75,65	100,86
	9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82	82,80	100,97
	10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71	85	119,71
	11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	93,76	94,05	100,30
	12.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100	100
	13.	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup	80	100	125

		UPT Stasiun KIPM Palembang (%)			
	14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	91,98	114,97
	15.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	97,50	121,87

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target. Secara lebih rinci, gambaran capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

SK.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan secara Profesional dan Patisipatif menjadi tolok uku dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Palembang. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi

CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Pada periode tahun 2024 capaian realisasi sektor Produksi Primer sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	-	-	-	70	100	142,85

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan

tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

Pada periode tahun 2024 capaian realisasi sektor Pasca Panen sebagai berikut :

Tabel 8. Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	-	-	-	70	100	142,85

IK3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Dalam rangka mendukung Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik antara lain: Unit pengumpulan/*supplier* dan pasar dikabupaten kota dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hasil Perikanan yang menjadi objek pengendalian meliputi ikan segar dan beku golongan demersal, pelagic, cephalopoda, mullusca dan ikan hasil budidaya.

Untuk mengimplementasikan inpres dimaksud terkait mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk perikanan, dengan harapan produk perikanan yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada tahun 2024 Indikator ini ditargetkan sebanyak 2 lokasi, dan pada Triwulan IV tahun 2024 merupakan kegiatan tahap 2, target lokasinya adalah lokasi yang sama dilakukan pada tahap I di triwulan I dan triwulan II dan target lokasi telah tercapai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

NO	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		LOKASI	LOKUS
1.	TW IV	Kabupaten OKU Timur	1. Cold storage PT. ASSA 2. Pasar Tradisional Martapura 3. Pasar Tradisional Gumawang 4. Pasar Tradisional Sidodadi
2.	TW IV	Kota Prabumulih	1. City Mall Kota Prabumulih 2. Pasar Tradisional Kota Prabumulih

Tabel 10. Target dan Realisasi IK3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	2	2	100	70	100	142,85

IK4. Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak

dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

CARA PENGUKURAN =

$$x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Pada periode tahun 2024 capaian realisasi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi IK4 Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	98	100	102,04	99	100	101,01

SK.2 Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Konsisten

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Konsisten menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Konsisten.

IK5. Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Realisasi pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selama triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024 adalah 100%. Surveillance kedua SNI ISO/IEC 17020:2012 telah dilaksanakan tanggal 27 September 2024, sedang reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 telah dilaksanakan tanggal 30-31 Oktober 2024. Ditemukan 2 (dua) temuan ketidaksesuaian yang ditemukan Ketika surveillance kedua SNI ISO/IEC 17020:2012 yang terdiri dari 1 temuan kategori 2 dan 1 temuan observasi. Temuan ketidaksesuaian kegiatan reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebanyak 13 (tiga belas) yang terdiri dari 12 temuan kategori 2 dan 1 temuan observasi. Semua temuan ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti dan dinyatakan MEMENUHI oleh asesor. Semua kegiatan terkait SNI ISO/IEC 17020 dan 17025 telah dilaksanakan di tahun 2024 ini, yaitu: audit internal, verifikasi metode, uji profisiensi, uji banding, Kaji Ulang Dokumen, Kaji Ulang Manajemen. Pada periode tahun 2024 capaian realisasi pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi perikanan sebagai berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi IK5 Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	-	-	-	70	100	142,85

SK.3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Upt Stasiun KIPM Palembang

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Upt Stasiun KIPM Palembang menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Upt Stasiun KIPM Palembang.

IK6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat Di UPT Lingkup BKIPM Menggunakan elektronik SKP (*e-survey SKM*) Masyarakat atau pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa di masing-masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9

unsur pertanyaan berupa persyaratan; sistem; prosedur; waktu pelayanan; biaya/tarif; produk spesifikasi; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; dan sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Survey kepuasan pelanggan di laksanakan oleh Stasiun KIPM Palembang dilakukan setiap triwulan, berikut hasil survey kepuasan pelanggan Tahun 2024:

Tabel 13. Target dan Realisasi IK6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	84	93,11	110,84	3,36	3,73	111,01

IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB NO, 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun Oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi

- c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM(Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir dan Seminar /Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâbatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-

1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 — ke atas	30
2	Baik	76 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5

5	Buruk	50 s.d kebawah	1
---	-------	----------------	---

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM Diklat Fungsional/Teknis, Dildat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terkhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terkhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN SKIPM Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen,

Pada tahun 2024 Indikator ini mempunyai target 86 merupakan indikator target semester dan telah direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 7 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);	84	90,88	108,19	86	89,49	104,05

IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indicator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indicator diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP.

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indicator proses dan memenuhi syarat indicator hasil WBK ≥ 75

Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Pada Tahun 2024, Stasiun KIPM Palembang masuk dalam unit kerja yang dinilai Pembangunan ZI nya dan pada Tahun 2024 telah menuntaskan 75,65 seperti tabel berikut:

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 8 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	-	-	-	75	75,65	100,86

IK9. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor public yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatanya, dilakukan antar lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Palembang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 82, pada Tahun 2024 telah terealisasi 82,80 seperti pada table berikut :

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 9 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) Pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	85	94,33	110,97	82	82,80	100,97

IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernenterian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%
- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;

- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

FORMULASI PERHITUNGAN

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : peneyerapan anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efesiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja
- Wp : bobot peneyerapan anggaran
- Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wcop : bobot capaian Output Program
- Wcro : bobot capaian RO

Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target sebesar 71, dan Pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 85 seperti pada table berikut :

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	97,84	113,76	71	85	119,71

IK11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang (Nilai);

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker /Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan

- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antar realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD BPeg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD BBar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD BMod n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + Dev DIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%). (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketetapan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketetapan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapatkan nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapatkan poin 100. Triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw \times 40 \%) + (NK Dini \times 30\%) + (NK BM \times 30 \%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyempaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyempaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagai berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit(Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi
- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 93,76, dan terealisasi sebesar 94,05 (Sangat Baik) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Target dan Realisasi IK 11 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	89	97,07	109,06	93,76	94,05	100,30

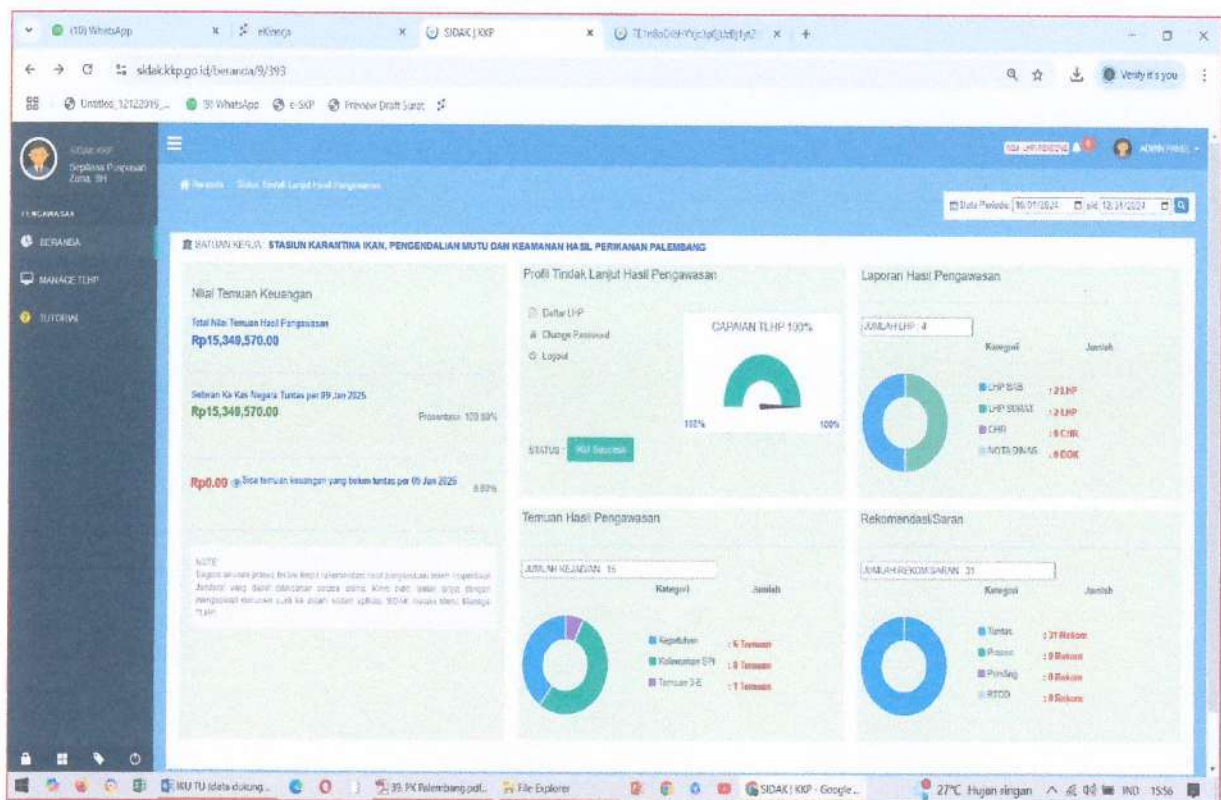
IK12. Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Penyelesaian temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target sebesar 100, dan Pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100 seperti pada tabel berikut :

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 12 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100	100	100	100	100

IK13. Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang



Gambar 10 . Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang telah ditindaklanjuti berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan sebesar 80%, Berdasarkan data SIDAK Inspektorat Jenderal, menunjukan Bahwa Stasiun KIPM Palembang Pada Tahun 2024 telah menuntaskan 100% Perbaikan, Nilai Rekomendasi hasil pengawasan SKIPM Palembang dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 20. Target dan Realisasi IK 13 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	75	100	133,33	80	100	125

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Palembang

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/lasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2024 target indikator ini sebesar 80 dan pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 91,98 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Target dan Realisasi IK 14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	77,5	78,26	100,98	80	91,98	114,97

IK15. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2024 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80, dan pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 97,50 Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi IK 15 Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	77,5	94,55	122	80	97,50	121,87

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Palembang pada tahun anggaran (TA) 2024 pada DIPA sebesar Rp. 5.887.307.000,- Realisasi Penyerapan anggaran pada Tahun 2024 Mencapai Rp. 5.604.371.042,- atau sebesar 95,19 % Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palembang berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang	5.486.307.000	5.279.847.474	96.24
2	Manajemen Mutu	129.500.000	118.795.955	91.73
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	271.500.000	205.727.613	75.77
Total		5.887.307.000	5.604.371.042	95.19

Tabel 24. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.588.750.000	3.476.364.491	96.87
2	Belanja Barang	2.298.557.000	2.128.006.551	92.58
3	Belanja Modal	0	0	0
Total		5.887.307.000	5.604.371.042	95.19

D. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu. Setiap indikator kinerja disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target indikator kinerja, dapat dilaksanakan langkah-langkah pencapaian target indikator kinerja kegiatan dijabarkan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi tersebut disajikan dalam jenis kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (triwulan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Desember/Triwulan IV Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Stasiun KIPM Palembang dapat dilaksanakan seluruhnya. Secara rinci realisasi rencana aksi pencapaian target indikator kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 disajikan pada Tabel 23 berikut:

Tabel 25. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	No	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		2024		Realisasi %
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	70	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	70	100	70	100	142,85
		70	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	70	100	70	100	142,85
		70	3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	70	100	70	100	142,85
		99	4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	99	100	99	100	101,01
2	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten	70	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	70	100	70	100	142,85

3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	3,36	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	Indeks	-	-	-	-	-	-	3,36	3,73	3,36	3,73	111,01
		86	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Indeks	-	-	-	-	-	-	86	89,49	86	89,49	104,05
		75	8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang	Nilai	-	-	-	-	-	-	75	75,65	75	75,65	100,86
		82	9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Nilai	-	-	-	-	-	-	82	82,80	82	82,80	100,97
		71	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Nilai	-	-	-	-	-	-	71	85	71	85	119,71
		93,76	11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	Nilai	-	-	-	-	-	-	93,76	94,05	93,76	94,05	100,30
		100	12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
		80	13	Pengawasan Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	80	100	80	100	125
		80	14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	80	91,98	80	91,98	114,97
		80	15	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	%	-	-	-	-	-	-	80	97,50	80	97,50	121,87

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 114,83 %;
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang yang diukur keberhasilannya dengan 15 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan dapat dicapai melebihi target dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan target realisasinya;
3. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Tahun 2024 dengan hasil yang sangat baik yaitu sebesar Rp.5.604.371.042,- atau 95,19% dari alokasi anggaran Rp.5.887.307.000,-. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang yang mencapai 114,83 % maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Stasiun KIPM Palembang cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi.

B. Rencana Perbaikan

Terhadap kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Stasiun KIPM Palembang akan melakukan langkah perbaikan yaitu akan dilakukan percepatan target dan realisasi tahun berikutnya.